

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. M. Yunus Wahid, 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenada Media.
- Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Volume I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Fauzi, dkk, 2010. *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Ahmad Redi, 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alan Boyle dan Patricia Birnie, 2002. *“International Law and the Environment”*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press.
- Alan. Boyle, 1994. *“Impact of International Law and Policy”*, dalam: Alan Boyle, ed., *“Environmental Regulation and Economic Growth”*, Clarendon Press.
- Andri G. Wibisana, 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung jawaban Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Fak Hukum UI.
- Binoto Nadapdap, 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Aksara.
- Brans Edward H.P., 2001. *Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage and Damage Assessment*, (The Hague: Kluwer Law International.
- Bruce Mitchell, dkk, 2010. *Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Busyra Azheri dan Isa Wahyudi, 2008. *Corporate Social Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publishing.
- Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung: Alumnii.
- E. Suherman, 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Get. II, Bandung: Alumnii.

- Elli Louka, 2006. *“International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order”*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Fajar Sugianto, 2013. *Economic Analisis of Law*, Seri I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2015 (edisi revisi). *Economic Approach to Law*. Jakarta: Prenada Media.
- FX Adji Samekto. 2013. *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan 1, Bandar Lampung: Indepth Publishing bekerja sama Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Universitas Lampung.
- Gray, Peter L., 2016. *The Superfund Manual: A Practitioner’s Guide to CERCLA Litigation*, Chicago: ABA.
- Gregor Polancik, *“Empirical Research Method Poster”*. Jakarta: 2009.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Terj. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hansen dan Mowen, 2009. *Akuntansi Manajerial*. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen, 2007. *Management Accounting, Eight Edition*, USA: Thomson South-Western.
- Hendrik B. Untung, 2007, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rheti, 2011. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ikhsan Abdullah, 2009. *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Irwansyah, 2020. *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- , 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 2, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Malang : SETARA Press
- Jimly Asshiddiqie dan All Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Jimly Asshiddiqie, 1998. *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Depok: Universitas Indonesia.
- , 2009. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1985. *“Peraturan-Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Andal”*, Jakarta: Kantor Menteri Negara KLH.
- , 1985. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2001. *Hukum Tata Lingkungan Ed.7 – Cet. 16*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laode M Syarif, Andri G Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID.
- Mahsun dkk, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mas Achmad Santosa, 2011. *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Muh. Muhdar, 2020. *Pertanggung jawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Muhammad Akib, 2013. *Politik Hukum Lingkungan – Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- N.H.T. Siahaan, 1987. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga.
- N.H.T. Siahaan, 2008. *Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Pancuran Alam.
- Nandang Sudrajat, 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana.
- Philippe Sands, 1995. *Principles of International Environmental Law Volume 1, (Frameworks, Standards and Implementation)*, Manchester University Press, Manchester.
- Philippe Sands, 2003. *Principles of International Environmental Law*, Second Editions, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pinto, M.C.W, 1986. *Reflection on International Liability for Injurious Consequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law*, Netherland Yearbook, Martinus Nijhoff Publisher.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *“Laporan Akhir Timpengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”*, Jakarta, 2015.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung* , Jakarta: 2013.
- Rachmat Trijono (ed), 2015. *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Richard A. Posner, 1998. *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, New York: Aspen Publishers.
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000. *“Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional”*, Surabaya: Airlangga University Press.
- , 2000. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi II. Surabaya: Airlangga University Press.
- , 2000. *Tanggung Gugat Pencemar Dan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran*, Jakarta: Skrep dan Walhi.

- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Keraf, 2010. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas.
- St, Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 1980)
- Syahrul Machmud, 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2012. *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Teguh Sri Pambudi, 2006. *CSR; Sebuah Keharusan Dalam Investasi Sosial*, Jakarta: Puspensos Depsos RI.
- Theo Huijbers, 2003. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tri Hayati, dkk, 2005. *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- W. Taylor, Paul, 1986. *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton: Princeton University Press.
- Yanita Mila Ardiani, 2015, *Sustainable Architecture*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL DAN MAKALAH**

- Abdul Rauf, Marthen Arie dan Irwansyah, 2012, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder di Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum (JPH) Volume 2 Nomor 1.
- Adryan Adisaputra Tando dan Theresia E.K. Hindriadita, *Aktualisasi Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Indonesia: Mencegah*

*Penyimpangan Prinsip Pencemar Membayar dan Earmarking*  
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2019.

Allan Kanner, *Natural Resource Restoration*, Tulane Environmental Law Journal 28, No. 1 2015.

Andri G. Wibisana, *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*, Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.

-----, *Three Principles of Environmental Law: Polluter-Pays Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, Asia Pacific Journal of Environmental Law, Vol. 14. ISS. 1&2. 2017.

-----, *"Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)"* Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47, No. 2. 2017.

Birkah Latif., S.M. Noor., Juajir Sumardi., dan Irwansyah, *Sustainable Development and Sea Protection: Trade on Fish and Fishery Product*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 343 (1), 2019. Dapat diunduh di: [https://www.researchgate.net/publication/337061782\\_Sustainable\\_development\\_and\\_sea\\_protection\\_Trade\\_on\\_fish\\_and\\_fishery\\_product](https://www.researchgate.net/publication/337061782_Sustainable_development_and_sea_protection_Trade_on_fish_and_fishery_product)

Boris N. Mamlyuk, *Analyzing the polluter Pays Principle Through Law and Economics*, Southeastern Environmental Law Journal. 2007.

Caras, Tamir, & Zohar Pasternak. *Long-term environmental impact of coral mining at the Wakatobi marine park, Indonesia*, *Ocean and Coastal Management*, Vol. 52, No. 10. 2009.

Carol Adaire Jones, "Economic Valuation of Resource Injuries in Natural Resource Liability Suits," *Journal of Water Resources Planning and Management* 126, No. 6. 2000.

Charles W. Schmidt, "Not-So-Superfund: Growing Needs vs. Declining Dollars", *The Environmental Health Perspectives*, Vol. 111, No. 3. 2003

Charless Himawan. *Menerapkan Temuan Ilmiah untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIPNAS) VI, LIPI. Jakarta. 2005.

- Craig Brett dan Michael Keen, "Political Uncertainty and The Earmarking of Environmental Taxes", *Journal of Public Economics*, Vol. 75. 2000.
- David M. Bearden, "Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act: A Summary of Superfund Cleanup Authorities and Related Provisions of the Act", Congressional Research Service, Juni 2012.
- Dona Pratama Junaidi dan Andri G. Wibisana. *Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia Dan Amerika Serikat*, *Jurnal ARENA HUKUM* Volume 14, Nomor 2. 2021.
- Edith Brown Weiss, *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, *The American Journal of International Law*, Vol. 84.1990.
- Elita Rahmi. *Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia*. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. (5). 2011.
- Franklin, Nicole. "The Superfund Program Past and Present Funding Implications", Tesis Virginia Commonwealth University, 2011.
- I Wayan Runa,. *Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata*, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 2, Nomor 1. 2012.
- Irwansyah. "Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development." *Sriwijaya Law Review* Vol. 1, No. 1. 2017.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Karen Bradshaw, "Settling for Natural Resource Damages", *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 40, 2016.
- Kuehn, Robert R., "A Taxonomy of Environmental Justice", *Environmental Law Reporter*, Vol. 30, 2000.
- Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. No. 5. Tahun 1993.
- Maria Farida Indrati S, 2012. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Yogyakarta: Kanisius.

- Marisa J. Mazzotta et.al., "Natural Resource Damage Assessment: The Role of Resource Restoration," *Natural Resources Journal*, Vol. 34 (Winter 1994).
- Martha L. Judy dan Katherine N. Probst, "Superfund at 30", *Vermont Journal of Environmental Law*, Vol. 11, hlm. 213.
- Marilang. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2. 2012.
- Maskun, dkk. *Environmental protection of mangrove forest: Affirmation consensus approach*, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Vol. 343. 2019.
- Muhammad Rustamaji. "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, No. 1. 2013.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah, 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Phelps, Jacob et.al. "Liability for Environmental Harm as a Response to the Anthropocene." In *Charting Environmental Law Futures in the Anthropocene*, edited by Michelle Lim. Singapore: Springer, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", artikel dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 3, Issue 02, Maret 2017.
- Roni Soemitro Roni Hanitijo S, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sherry Arnstein, "*Ladder of Citizen Participation*", *Journal of the American Institute of Planners*, November 2007.
- Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.



## **DISERTASI, TESIS**

Juajir Sumardi, 2005., *Hukum Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)*, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

M. Su'aidy Hadi S. 2006. *Tanggung Jawab Social Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Dalam Bentuk Program Community Deveopment sebagai wujud Implementasi Undang-Undang Migas*, Tesis: PPs Universitas Brawijaya Malang.

Muhammad Ikhsan Lubis, 2015. *Aspek Perdata dalam Perkara Eksploitasi Hutan dan Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Ronny Adrie Maramis, 2013. *Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*, Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Sutanto Pitta Maharani, 2019. *Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup Atas Terkabulnya Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Sutanto Pitta Maharani, 2019. *Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup Atas Terkabulnya Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Tomi Risman, 2018. *Pembebanan Biaya Lingkungan Pada Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan Batu Bara*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

## **LAPORAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Utara Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017, Jakarta: 2017.

## **MAKALAH SEMINAR**

Bagir Manan, 1995. *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*. Seminar Nasional Pertambangan, Bandung: LP-UNPAD.

M. Akil Mochtar, “Tata Kelola Sektor Migas Nasional yang Berkeadilan Sesuai Perspektif Konstitusi: Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,” Disampaikan pada Diskusi Publik Seri Ke-VI dengan tema “Masa Depan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golongan Karya di Jakarta, Selasa, 4 Desember 2012.

## **SURAT KABAR, INTERNET**

“Meares Langgar Aturan Lingkungan”, TEMPO.co (30/01/2007).

“DPRD Sulut Tolak Tambang Emas di Hutan Lindung”, Kompas (09/04/2008).

Siaran Pers JATAM, 2005. “Segera Hentikan Kegiatan PT. MSM” .

“Diduga Cemari Lingkungan, Tambang Emas Diminta Setop Beroperasi” Okezone (07/09/2012).

Majalah Tempo. 2019. “Menanggung Dampak Limbah Freeport,”

Majalah Tempo. “Bopeng Bumi Karena Emas,” dikutip pada laman: <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/87207/bopeng-bumi-karena-emas>.

Liputan 6. 2019. Dikutip pada laman: <https://www.liputan6.com/news/read/3870574/banjir-bandang-ituhanyutkan-ribuan-rumah-warga-di-manado> diakses 23 Februari 2019.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 2018. *Tinjauan Lingkungan Hidup: Bagaimana Masa Depan Keadilan Ekologis 2018?*. Jakarta: WALHI.

Dedy Triyanto Ari Rahmad dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*, disadur dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6054/4551>. Data akses 25 Januari 2022 pukul 21.15 wita.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.

<https://archiindonesia.com/id/sekilas-perusahaan/>.

<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>.

<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment>.

Data akses 15 Juli 2021 pukul 23.15 wita.

<https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act> Data akses 15 September 2021 pukul 21.35 wita.

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0002682/2009-12-03>. Data akses 15 September 2021 pukul 21.50 wita.

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0002731/2016-04-14>. Data akses 15 September 2021 pukul 22.05. wita.

<https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html>. Data akses 15 September 2021 pukul 22.15. wita.

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.25 wita.

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.30 wita.

<https://tatanegara.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/KOREA-SELATAN.doc>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.35 wita.

<https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.40 wita.

<https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1#:~:text=The%20Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20South%20Africa%2C%201996%2C%20was,the%20provisions%20of%20the%200Constitution>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.45 wita.

Wiwiek Awiaty, “Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan”, Bahan Kuliah, [www.bem.law.ui.ac.id](http://www.bem.law.ui.ac.id)., diunduh 13 Oktober 2021 pukul 22.35 wita.

[https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD\(92\)81&docLanguage=En#:~:text=The%20Polluter%2DPays%20Principle%20\(PPP,the%20costs%20of%20pollution%20control.&text=Generally%20speaking%2C%20a%20polluter%20has,any%20pollution%20that%20he%20originates](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=En#:~:text=The%20Polluter%2DPays%20Principle%20(PPP,the%20costs%20of%20pollution%20control.&text=Generally%20speaking%2C%20a%20polluter%20has,any%20pollution%20that%20he%20originates). Data akses 15 September 2020 pukul 22.10 wita.

<https://www.rajawali.com/>

<https://archiindonesia.com/id/hubungan-investor/ikhtisar-utama-investasi/>. Data akses 27 Oktober 2021 pukul 21.5 wita.

Laporan dapat diakses di: [https://sustainability.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2021/07/Pusat\\_Reklamat\\_SDGs-Report\\_2020.pdf](https://sustainability.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2021/07/Pusat_Reklamat_SDGs-Report_2020.pdf).

“Jatam: Ada 71 Konflik Pertambangan Periode 2014-2019”, hukumonline.com (07/01/2020).

“2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang, Kriminalisasi hingga Berujung Bencana”,Siaran Pers Catatan Akhir Tahun 2020 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta, 2021.

“Walhi: Industri Tambang Indonesia Belum Mampu Mematuhi Kaidah Lingkungan Dengan Baik” kontan.co.id (12/01/2021).

“Pemerintah: Perusahaan Tambang Segera Pulihkan Lingkungan”. Media Indonesia.com (23/04/2019).

“Tolak Tambang Emas, Warga Sangihe Kaget Tanah Sudah Diberi Harga” Tempo.co (15/06/2021) pukul 11.51 wib.

Putusan MK Nomor: 32/PUU-VIII/2010. Link dapat diunduh di: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_32%20PUU%202010-%20TELAH%20BACA%204-6-2012.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_32%20PUU%202010-%20TELAH%20BACA%204-6-2012.pdf)

United States Environmental Agency, “Superfund Enforcement: 35 Years of Protecting Communities and the Environment”, <https://19january2017snapshot.epa.gov/enforcement/superfund-enforcement-35-years-protecting-communities-and-environment>, diakses pada tanggal 1 Februari Januari 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang U No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2014.

Keputusan Menteri ESDM 1827/K/MEM/30/2018 lampiran VI memuat tentang pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

## **PUTUSAN**

Putusan MK Nomor: 32/PUU-VIII/2010.

Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.